

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Abstrak.....	vii
Analisis Perdagangan Beras dan Ketahanan Pangan di Negara-Negara Asia Tenggara <i>oleh: Iwan Hermawan.....</i>	157-198
Pemikiran Politik Islam Liberal di Indonesia Dewasa Ini <i>oleh: Prayudi.....</i>	197-224
Kapitalisme Internasional dan Fenomena Penjarahan Lahan di Indonesia <i>oleh: Poltak Partogi Nainggolan</i>	225-262
Penghapusan Kebijakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) <i>oleh: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias</i>	263-285
Strategi Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014 <i>oleh: Debora Sanur Lindawati.....</i>	287-312
Demokrasi Politik Minoritas di Indonesia <i>oleh: M. Imaduddin Nasution, S.Sos.....</i>	313-335
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal *Politica* merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, merupakan wadah bagi para peneliti dan masyarakat akademis untuk menyampaikan ide dan/atau gagasan yang terkait dengan dinamika politik dalam dan luar negeri. Jurnal ini merupakan salah satu sumber rujukan bagi pemerhati dan pengambil kebijakan di bidang politik baik di DPR RI maupun lembaga negara lainnya dengan melihat berbagai kajian dan analisis yang tersaji melalui berbagai tulisan di dalamnya. Pada Vol. 4 No. 2 November 2013, Jurnal *Politica* menyajikan 6 (enam) tulisan yang merupakan hasil kajian di bidang politik dalam dan luar negeri.

Tulisan pertama disajikan oleh Iwan Hermawan dengan judul tulisan “Analisis Perdagangan Beras dan Ketahanan Pangan di Negara-Negara Asia Tenggara.” Pada tulisan ini disebutkan perdagangan beras berfungsi untuk menjaga stok beras yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan domestik negara-negara di Asia Tenggara. Pengekspor dan pengimpor beras utama dunia diantaranya berada di wilayah Asia Tenggara, sehingga perubahan jumlah beras yang diperdagangkan dapat mempengaruhi aliran perdagangan tersebut. Pada umumnya negara-negara Asia Tenggara mengintervensi pasar beras melalui kebijakan perdagangan internasional guna menguatkan tingkat ketahanan pangan.

Tulisan kedua berjudul “Pemikiran Politik Islam Liberal dan Perkembangan di Indonesia Dewasa Ini,” yang ditulis oleh Prayudi. Dinamika pemikiran politik Islam memiliki peran strategis dalam kehidupan kenegaraan, dengan segala perdebatan yang mengiringinya di tingkat pelaksanaan. Salah satu diantara yang berkembang di Indonesia, antara lain adalah aliran pemikiran politik Islam Liberal. Penulis menilai substansi perdebatan yang penting dicermati dalam warna pemikiran politik Islam Liberal bersentuhan erat dengan berbagai hal, antara lain adalah mengenai isu sekularisasi di satu sisi dan isu pluralisme di sisi lainnya.

Tulisan berjudul “Kapitalisme Internasional dan Fenomena Penjarahan Lahan di Indonesia,” adalah tulisan ketiga dalam jurnal ini yang ditulis oleh Poltak Partogi Nainggolan. Penjarahan lahan dewasa ini semakin marak berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia seiring dengan meningkatnya

aktivitas investasi perusahaan multinasional dan menyusutnya secara cepat lahan produktif. Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis. Beberapa temuan penelitian mengungkapkan laju konversi lahan yang cepat terjadi akibat perkebunan sawit, pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi SDA. Temuan yang lain berupa terjadinya degradasi lingkungan, krisis pangan, dan bermunculannya konflik-konflik sosial akibat maraknya penjarahan lahan.

“Penghapusan Kebijakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI),” yang ditulis oleh Dewi Sendhikasari Dharmaningtyas adalah tulisan keempat dalam jurnal ini. penulis menilai pendidikan bukan hanya merupakan pilar terpenting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. RSBI sebagai suatu kebijakan publik di bidang pendidikan dianggap telah gagal mencapai tujuan dan harapan yang ingin diwujudkan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. kebijakan RSBI dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dalam konstitusi yang mengamatkan pemerataan pendidikan bagi semua rakyat.

Tulisan kelima berjudul “Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014,” yang ditulis oleh Debora Sanur Lindawati. Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Penulis menilai partai politik sebagai mesin politik yang sangat efektif, harus dapat memahami selera publik terutama terkait penentuan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2014. Karena jika hal ini tidak diperhatikan, partai politik akan ditinggalkan publik.

Tulisan keenam dalam jurnal ini berjudul “Demokrasi dan Politik Minoritas di Indonesia,” yang ditulis oleh M. Imaduddin Nasution. Di Indonesia, kelompok-kelompok minoritas memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Minoritas di Indonesia bagaimanapun juga telah turut mewujudkan Indonesia yang sangat demokratis dengan tingkat partisipasi politik warga di atas tingkat partisipasi warga Amerika Serikat. Namun demikian partisipasi politik minoritas di Indonesia menghadapi persoalan besar seperti diskriminasi, isu no-muslim, isu aliran sesat dan isu non-pribumi. Pada tulisan ini diperlihatkan bagaimana politik minoritas di Indonesia, partisipasi politik kelompok minoritas tertentu dalam politik Indonesia, hak dan kewajiban minoritas, serta pengaruh keberadaan kelompok minoritas terhadap jehidupan politik di Indonesia.

Dari keenam tulisan yang tersaji pada edisi kali ini terdapat berbagai konsep atas berbagai persoalan yang terjadi di seputar persoalan politik dalam

dan luar negeri. Sudah pasti juga tulisan-tulisan ini pun tidak lepas dari realita yang terjadi di masyarakat kita. Untuk itulah redaksi berharap jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca khususnya para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lili Romli, M.Si., Peneliti Utama LIPI dan Dr. Ganewati Uryandari, MA., Peneliti LIPI sebagai Redaksi Ahli atas berbagai koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam edisi kali ini.

Jakarta, November 2013

Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Iwan Hermawan

Analisis Perdagangan Beras dan Ketahanan Pangan di Negara-Negara Asia Tenggara

Perdagangan beras berfungsi untuk menjaga stok beras yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan domestik negara. Pengekspor dan pengimpor beras utama dunia di antaranya berada di wilayah Asia Tenggara, sehingga perubahan jumlah beras yang diperdagangkan dapat mempengaruhi aliran perdagangan tersebut. Mengingat beras sebagai komoditas yang sangat strategis maka banyak negara mengintervensi pasar beras domestiknya guna mewujudkan ketahanan pangan dan bahkan bagi kepentingan keamanan politik negaranya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan perdagangan beras di wilayah Asia Tenggara terkait dengan ketahanan pangan. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2012, laju pertumbuhan impor beras negara-negara Asia Tenggara mencapai 14,08 persen dan dengan kontribusi konsumsi beras mencapai lebih dari 22 persen terhadap konsumsi beras dunia. Sedangkan laju pertumbuhan ekspor berasnya mencapai 2,21 persen dan dengan produksi padi lebih dari 30 persen terhadap produksi padi dunia. Pada umumnya negara-negara Asia Tenggara mengintervensi pasar beras melalui kebijakan perdagangan internasional, baik berupa larangan ekspor maupun lisensi, dan kebijakan stabilisasi harga beras domestik, untuk menjaga stok beras guna menguatkan tingkat ketahanan pangan. Integrasi ekonomi Asia Tenggara melalui ASEAN Economy Community menjadi momen penting untuk menjadi landasan dalam mewujudkan ketahanan pangan pada level regional dan sekaligus menjadikan pasar beras lebih terbuka antarnegara-negara Asia Tenggara.

Kata kunci: beras, perdagangan, Asia Tenggara, kebijakan

Iwan Hermawan

Analysis of Rice Trade and Food Security in Southeast Asia Countries

Rice trade has function to maintain sufficient rice stock for fulfill domestic demand. Some of main rice exporter and importer countries in world market are in Southeast Asia region, so changing in traded rice quantities will influence trade flow. Rice as strategies commodities and so many countries have intervened in domestic rice market to achieve food security and political security. The aim of this paper is analysis of development of rice trade in southeast asia countries related with food security. Anlysis descriptive approached is applied to answer that aim. The result showed that in 2005-2012, growth rate of rice impor in Southeast Asia countries is 14,08percent and dan rice consumption share is more than 22 percent to world rice consumption. Growth rate of its rice export is 2,21percent and supporting paddy production share is more than 30 percent to paddy production in the world. Government has intervened rice market through international trade, such as rice export ban and license scheme, and domestic rice price stabilization policy to maintain rice stock refer to food security. Economic integration through ASEAN Economy Community will be a important moment as a base to achieve food security and making rice market more opened intra-Southeast Asia countries.

Keywords: rice, international trade, policy, Southeast Asia

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Prayudi

Pemikiran Politik Islam Liberal dan Perkembangannya di Indonesia Dewasa Ini
Dinamika pemikiran politik Islam memiliki peran strategis dalam kehidupan kenegaraan, dengan segala perdebatan yang mengiringinya di tingkat pelaksanaan. Salah satu di antara yang berkembang di Indonesia, antara lain adalah aliran pemikiran politik Islam Liberal. Aliran ini mencoba menawarkan kebebasan gagasan rasionalitas ajaran Islam yang sangat berlawanan dengan model pemahaman secara literal. Kehadirannya justru menjadi kontroversi politik tersendiri terkait dengan sistem politik demokrasi di Indonesia yang sedang berusaha menuju transisi ke arah konsolidasi, dalam peta jalan secara kelembagaan sebagaimana diinginkan oleh sebagian elit dan mayoritas publik. Substansi perdebatan yang penting dicermati dalam warna pemikiran politik Islam Liberal bersentuhan erat dengan berbagai hal, antara lain adalah mengenai isu sekularisasi di satu sisi dan isu pluralisme di sisi lainnya.

Kata Kunci: Islam liberal, sekularisasi, pluralisme, demokrasi

Prayudi

Liberal Islam's Political Thinking and its Development in Contemporary Indonesia

The dynamic of an Islam political thinking have a strategic role in the state affairs, with all their arguments which was followed in the implementation levels. One of among that develop in the Indonesian landscape, is the proponent called as a Liberal Islamic political thinking. These stream proposed a freedom of an Islamic rationality idea which contradict with the model of literal comprehension of Islam thinking. Their present is precisely become a specific political controversial in Indonesia where an effort to achieve toward consolidation of democratic transition base on a road map who wants by a half of an elite and the majority of public. The important of substance from a debate in the Islamic liberal thinking has been marked with many things aspect, such as an issues of secularization in the one side and pluralism as an issues in the other side.

Keywords: Islamic liberal, secularization, pluralism, democracy

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Poltak Partogi Nainggolan

Kapitalisme Internasional dan Fenomena Penjarahan Lahan di Indonesia

Penjarahan lahan dewasa ini semakin marak berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia seiring dengan meningkatnya aktifitas investasi perusahaan multinasional dan menyusutnya secara cepat lahan produktif. Indonesia sebagai negara yang memiliki lahan yang luas sangat terancam oleh laju konversi lahan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan kapitalisme internasional. Tulisan ini adalah hasil penelitian deskriptis-analitis, yang dilakukan pada tahun 2013 dengan menggunakan metode kualitatif. Field researches dilakukan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi NTT. Beberapa temuan penelitian mengungkapkan laju konversi lahan yang cepat terjadi akibat perkebunan sawit, pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi SDA. Temuan penelitian juga mengungkapkan terjadinya degradasi lingkungan, krisis pangan, dan bermunculannya konflik-konflik sosial akibat maraknya penjarahan lahan. Keterlibatan aparat di balik berbagai praktek penjarah lahan oleh MNCs dan lemahnya penegakan hukum juga terungkap dalam hasil penelitian ini.

Kata Kunci: Penjarahan lahan, kapitalisme internasional, konversi lahan, konflik sosial, MNC, TNC

Poltak Partogi Nainggolan

International Kapitalism and the Land Grabbing Phenomena in Indonesia

Land grabbing phenomena tends to increasingly occur today in many regions of Indonesia while at the same time MNCs activities and investments dramatically increase, and productive land tends to rapidly decrease. Indonesia, a country which consists of large land area, is seriously threatened by fast land conversion in order to deal with the demand of international capitalism. This essay is resulted from an analytical and a descriptive research conducted in 2013 by applying a qualitative methode. Field researches are conducted in West Papua and East Nusa Tenggara provinces. Its research findings reveal that the fast land conversion caused by the emergence of new palm oil plantation, the development of new infrastructure, exploitation of natural resources, especially mining. Further findings shows several impacts of land grabbing, namely environmental degradation, food crisis, and the emergence of social conflicts. The involvement of state apparatus in land grabbing process and poor law enforcement are also disclosed and discussed in this essay.

Keywords: Land grabbing, international capitalism, land conversion, social conflict, MNC, TNC

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias

Penghapusan Kebijakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)

Pendidikan bukan hanya merupakan pilar penting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. RSBI sebagai suatu kebijakan publik di bidang pendidikan dianggap telah gagal mencapai tujuan dan harapan yang ingin diwujudkan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Kebijakan RSBI dianggap menyalahi konstitusi walaupun telah diamanatkan dalam Pasal 50 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dalam konstitusi yang mengamanatkan pemerataan pendidikan bagi semua rakyat. Oleh karena banyaknya kontroversi tentang RSBI dari berbagai kalangan terhadap dunia pendidikan, Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan RSBI.

Kata Kunci: RSBI, pendidikan, kebijakan publik

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias

The Removal of Initial Policy of Developing Schools with International Standard (RSBI)

Education is not only an important pillar to bring progress to the nation, but also a necessary condition for improving the welfare of the people. Unfortunately, RSBI as a public policy in education is considered to have failed to achieve its goal to improve the quality of education in this country. It is argued in this essay that RSBI againts the 1945 state constitution article 50 paragraph 3 of Law No. 20 2003 is contrary to the Constitution which has guaranteed education for all Indonesian people. Because of this controversy and many criticism, the Constitutional Court has finally revoked the RSBI policy.

Keywords: RSBI, education, public policy

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Debora Sanur Lindawati

Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014

Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sementara itu, Pemilu adalah arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih dan menseleksi pemimpinnya. Namun demikian Partai politik sebagai mesin politik yang sangat efektif, harus dapat memahami selera publik terutama terkait penentuan calon legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden dalam strateginya untuk menghadapi Pemilu 2014. Jika tidak, partai politik akan ditinggalkan publik.

Kata Kunci: Pemilu 2014, partai politik, demokrasi, marketing politik, strategi partai

Debora Sanur Lindawati

Parties Strategy Toward the 2014 Election

Political party is a means for political participation of the constitutional democracy to realize the national ideals of the Indonesian. Meanwhile, the election is an arena for people to express their freedom in choosing and selecting their leaders. In this context, political party as a political machine must be able to understand public aspiration, especially regarding legislatives and presidential candidates and their running mate the 2014 election. Otherwise, political parties will be more ignored by public. This condition will increase the member of people who will not exercise their political right in the coming election.

Keywords: 2014 election, political party, democracy, political marketing, party strategy

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

M. Immaduddin Nasution, S.Sos.

Demokrasi dan Politik Minoritas di Indonesia

Di Indonesia, kelompok-kelompok minoritas memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Minoritas di Indonesia bagaimanapun juga telah turut mewujudkan Indonesia yang sangat demokratis, dengan tingkat partisipasi politik warga di atas tingkat partisipasi warga Amerika Serikat. Akan tetapi, sebenarnya partisipasi politik minoritas di Indonesia menghadapi persoalan besar. Diskriminasi, isu non-Muslim, isu aliran sesat dan isu non pribumi senantiasa mewarnai ritual demokrasi di Indonesia. Sementara itu, adanya kewajiban warga negara untuk memilih satu dari enam agama “resmi” negara, menjadi sebuah bentuk diskriminasi terhadap agama-agama lain selain keenam agama resmi tersebut. Artikel ini pada awal pembahasannya, akan membahas konsep-konsep partisipasi dan representasi politik minoritas, persoalan integrasi kelompok minoritas ke dalam entitas domisili mereka dan hak-hak identitas kelompok minoritas, yang harus diperjuangkan, dalam konteks politik minoritas dan politik identitas. Pada paruh keduanya, artikel ini akan membahas politik minoritas Kristen di Indonesia, yang diteruskan dengan pembahasan mengenai politik identitas kelompok-kelompok minoritas lainnya yang ada di Indonesia. Artikel ini ditulis untuk memperlihatkan bagaimana politik minoritas di Indonesia, partisipasi politik kelompok minoritas tertentu dalam politik Indonesia, hak dan kewajiban minoritas, serta pengaruh keberadaan kelompok minoritas terhadap kehidupan politik di Indonesia.

Kata Kunci: Politik; identitas; minoritas; demokrasi; Indonesia

M. Immaduddin Nasution, S.Sos.

Democracy and Minority Politics in Indonesia

In Indonesia, the minority groups have a fairly high political awareness. However the minority in Indonesia have also realize a very democratic Indonesia, with higher political participation of citizens, above the participation of United States citizens. However, the actual political participation of minorities in Indonesia is facing a big problem. Discrimination, religious issues and ethnical issues ever coloring the ritual of democracy in Indonesia. In the meantime, the obligation to choose one of six “official” religions, being a form of discrimination against the other religions. This article will discuss the concepts of participation and political representation of minorities, the matters of integration of minority groups and the rights of identity of the minorities in the context of minority politics and identity politics. This article will also discuss the Christian minority politics in Indonesia, which is followed by discussion of the politics of identity of the other minority groups in Indonesia. This article was written to show how the minority politics, political participation rights and obligations, as well as their influence in Indonesian politics are exercised.

Keywords: Minority; minority rights, minority politics, democracy, Indonesia